

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana pribadi atau sekelompok masyarakat dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan dasar dan hak-hak sosial, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, serta lingkungan yang layak sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut UU No. 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2, pengembangan sosial ini dapat dilakukan Dalam bentuk layanan kemasyarakatan yang meliputi pemulihan fungsi sosial, penyediaan jaminan sosial, penguatan peran sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti tidak meratanya akses terhadap layanan publik dan juga masih adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Masyarakat dengan status terlantar, termasuk gelandangan, pengemis, dan orang-orang yang kehilangan tempat tinggal seringkali menghadapi berbagai tantangan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat terjadi pada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mempunyai hambatan atau kesulitan sehingga kelompok tersebut membutuhkan adanya layanan sosial untuk pemenuhan kebutuhannya. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang masih memiliki angka masalah kesejahteraan sosial cukup tinggi. Berdasarkan data dari Bappeda DIY, masih tercatat sejumlah kasus kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah masyarakat dengan status pengemis, gelandangan, orang terlantar, dan rawan sosial ekonomi dalam dari tahun 2021-2024.

Elemen : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Sarana Kesejahteraan Sosial					
Jenis PMKS	Tahun				Satuan
	2021	2022	2023	2024	
Pengemis	111,00	64,00	61,00	n/a	Orang
Laki-Laki	57,00	28,00	30,00	n/a	Orang
Perempuan	54,00	36,00	31,00	n/a	Orang
Gelandangan	123,00	72,00	58,00	n/a	Orang
Laki-Laki	70,00	46,00	41,00	n/a	Orang
Perempuan	53,00	26,00	17,00	n/a	Orang
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	12.407,00	11.526,00	11.819,00	n/a	Orang
Laki-Laki	0,00	0,00	n/a	n/a	Orang
Perempuan	12.407,00	11.526,00	11.819,00	n/a	Orang

Tabel 1.1 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi DIY

Sumber: BAPPEDA DIY (<https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>)

Dalam data ditunjukkan bahwa masyarakat masih rentan terhadap masalah ketimpangan, khususnya bagi para perempuan. Perempuan rentan terhadap diskriminasi gender, kekerasan, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dan pekerjaan sehingga hal tersebut menyebabkan perempuan rawan sosial ekonomi. Masalah kesenjangan perlakuan berbasis gender yang menimpa kaum perempuan menurut Bemmelen (2003; dalam Apriliandra & Krisnani, 2021) termasuk di dalamnya adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan, norma-norma yang berlaku di masyarakat, persepsi umum mengenai peran dan nilai gender yang diperoleh dari buku pelajaran, serta pandangan yang dianut oleh para pendidik dan kebijakan yang cenderung berpihak pada satu gender. Akibatnya, perempuan tersisih dan menghadapi berbagai hambatan yang membatasi ruang gerak, kebebasan berekspresi, serta peluang untuk mengembangkan potensi dirinya. (Permana & Maulana, 2020; dalam Apriliandra & Krisnani, 2021). Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan sebuah intervensi yang berfokus dan berkelanjutan, salah satunya adalah menyediakan pelayanan sosial dalam aspek pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para perempuan.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah provinsi yang memiliki keragaman agama dan budaya. Namun, dengan urgensi yang ada, Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki fasilitas pelatihan bagi perempuan yang memadai. Dari data Bappeda Provinsi DIY, saat ini hanya terdapat satu fasilitas balai rehabilitasi yang juga difungsikan sebagai panti karya wanita. Terbatasnya jumlah anggaran menyebabkan hambatan untuk melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan panti (Astuti et al., 2021).

Sub Elemen	Tahun				Satuan
	2021	2022	2023	2024	
Panti Sosial Karya Wanita (Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita)	1	1	1	1	Unit

Tabel 1.2 Panti Sosial Wanita Provinsi DIY

Sumber: BAPPEDA DIY (<https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/>)

Maka dari itu, judul "*Women Empowerment Center Through Women Behavioral Approach*" yang diajukan adalah bertujuan untuk menghadirkan rancangan desain pusat pemberdayaan bagi perempuan yang terintegrasi, nyaman, dan mendukung para perempuan untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan secara keseluruhan dengan memerhatikan elemen-elemen desain yang memfasilitasi proses pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi. Perancangan *Women Empowerment Center* diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang terjadi. *Women Empowerment Center* ini

memberikan fasilitas untuk pemberdayaan peran wanita dalam keluarga, masyarakat, agama, dan negara. Selain hal tersebut, pemberdayaan yang dimaksud juga mengarah kepada pemberdayaan psikologis, pendidikan, dan spiritual. Pemberdayaan dalam aspek ekonomi berfokus kepada pembekalan keterampilan bagi para Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

Perancangan *Women Empowerment Center* ini berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki jumlah penduduk perempuan yang cukup tinggi. Tercatat dalam Data Vertikal Badan Pusat Statistik Provinsi Yogyakarta terdapat 1.899.380 penduduk perempuan pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,66%. Di tahun 2023 sebanyak 11.890 perempuan tercatat mengalami kasus rawan sosial ekonomi.

Selain memberikan fasilitas dan layanan bagi pihak perempuan yang terlibat langsung dengan kasus kesejahteraan sosial dan ekonomi, *Women Empowerment Center* ini juga merupakan bagian dari Upaya strategis dalam rangka mengorganisasi masyarakat untuk dapat menangani kasus kesejahteraan sosial ekonomi pada perempuan yang muncul di area sekitar

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana merancang sebuah pusat pemberdayaan bagi perempuan yang sesuai dengan pola perilaku perempuan PRSE?
- b. Bagaimana menciptakan sebuah wadah bagi perempuan yang dapat memberikan pelayanan yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikososial?
- c. Bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi para perempuan PRSE?

1.3. Tujuan

Perancangan ini bertujuan untuk menghadirkan rancangan desain pusat pemberdayaan bagi perempuan yang terintegrasi, nyaman, dan mendukung para perempuan untuk menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan secara keseluruhan dengan memerhatikan elemen-elemen desain yang memfasilitasi proses pemberdayaan bagi perempuan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Praktis

Memberikan pembelajaran terhadap pemahaman teoritis mengenai integrasi layanan sosial yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan dukungan psikososial dalam satu tempat, serta memperluas wawasan tentang bagaimana desain lingkungan dapat memengaruhi aspek

kenyamanan, dukungan psikologis, dan proses pemberdayaan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE).

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan usulan perencanaan dan perancangan desain dengan menerapkan pendekatan arsitektur perilaku yang berfokus pada skenario aktivitas (*women behavioral*) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan kaitannya dengan teori feminis. Teori feminis berkembang dari perspektif konflik yang menyoroti dominasi laki-laki dalam struktur sosial, serta hak istimewa dan kekuasaan yang dimiliki oleh kelompok dominan sebagai akibat dari distribusi sumber daya yang tidak merata (Apriliandra & Krisnani, 2021).

1.5. Lingkup Penelitian

Lingkup substansial menitikberatkan terkait pembahasan konsep skenario aktivitas dan penerapan arsitektur perilaku yang berfokus pada *women behavioral* pada pusat pemberdayaan. Lingkup spasial perancangan ini adalah pusat pemberdayaan bagi perempuan rawan sosial ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6. Metode Pembahasan

1.6.1. Metode Deskriptif

Melakukan penjabaran mengenai objek pusat pemberdayaan dengan melakukan studi literatur, yakni proses pengumpulan data dengan menelaah berbagai teori dan regulasi yang relevan, serta disertai observasi lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi perencanaan dan perancangan, studi komparatif, dan data pendukung lainnya.

1.6.2. Metode Komparatif

Melakukan studi preseden dengan melakukan perbandingan pada beberapa objek arsitektur serupa dan mengulik beberapa aspek pada bangunan.

1.7. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini Berisi penjelasan ringkas mengenai latar belakang, tujuan, manfaat, dan alur penulisan yang menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam proses penyusunan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini berisi literatur mengenai tinjauan umum tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial, pusat pemberdayaan, pemberdayaan wanita, arsitektur perilaku, dan juga studi banding pustaka.

BAB III Tinjauan Pengguna, Lokasi, dan Tapak

Pada BAB III ini berisi uraian mengenai tinjauan pengguna dan data umum mengenai lokasi dan tapak perancangan.

BAB IV Pendekatan Program Perencanaan dan Perancangan

Pada BAB III ini berisi uraian mengenai pendekatan perancangan aspek fungsional, pendekatan kapasitas ruang, studi besaran ruang, dan pendekatan aspek kinerja.

1.8. Alur Pikir

AKTUALITAS

- Masalah kesejahteraan sosial yang masih sering terjadi di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peningkatan kebutuhan masyarakat sehingga perlu adanya pengembangan pengembangan potensi untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak
- Merespon kebutuhan fasilitas yang relevan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan peningkatan potensi dalam diri wanita serta kesejahteraannya.

URGENSI

- Menyediakan tempat atau lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung aktivitas pemberdayaan wanita
- Butuhnya kesadaran masyarakat untuk berkembang sehingga perlu adanya fasilitas ruang yang dapat membentuk kesadaran tersebut.
- Daerah Bantul memiliki potensi karena banyak terdapat permukiman warga yang cukup padat dan masih cukup banyak terjadi masalah kesejahteraan sosial.

ORIGINALITAS

Perlu direncanakan pusat pemberdayaan perempuan yang menggabungkan prinsip-prinsip arsitektur dan hubungannya dengan kebiasaan atau kebutuhan masyarakat, juga menggabungkan prinsip arsitektur modern dan tradisi lokal sehingga menghasilkan bangunan yang konservatif sumberdaya dan hemat biaya serta dapat menjadi wadah yang efektif bagi kegiatan pemberdayaan wanita yang dilakukan di dalamnya.

TUJUAN

Merancang pusat pemberdayaan yang dapat menyesuaikan pola perilaku wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi) sehingga memenuhi kebutuhan perlindungan, penyembuhan, dan kesejahteraan.

SASARAN

Meminimalisasi adanya masalah kesejahteraan sosial dengan membantu menyediakan fasilitas untuk berkembang dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Studi Pustaka

- Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- Tinjauan Umum *Women Empowerment*
- Tinjauan Umum *Gender*
- Tinjauan Umum *Women Empowerment Center*
- Tinjauan Umum Arsitektur Perilaku

Studi Banding Preseden

- *Women's Empowerment Center in Rwanda*
- BPRSW Kota Yogyakarta
- Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo Kota Semarang

Studi Lapangan

- Tinjauan tapak perancangan pusat pemberdayaan wanita di Yogyakarta

Konsep Desain

- Menggunakan konsep terbuka-tertutup (bangunan terkesan tertutup yang menggambarkan privasi dan keamanan dari luar, namun terbuka pada bagian dalam sehingga menunjukkan kebebasan

Analisis Tapak

- Perencanaan
- Zoning
- Masing

Hasil